
Memerangi Pembelotan: Mengungkap Dampak Kebijakan Pertahanan terhadap Tingkat Tentara Desertir di Zona Tempur

Battling Defection: Unveiling the Impact of Defense Policies on Soldier Deserter Rates in Combat Zones

Aris Sarjito

Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 10430, Indonesia

*Corresponding author: arissarjito@gmail.com

Article Info

Received:
22/03/2024;

Received in revised form:
11/03/2025;

Accepted:
13/03/2025;

Available online:
18/03/2025;

2549-9505/© 2025 The
Authors. Published by
Universitas Muhammadiyah
Purwokerto.

DOI: [10.30595/jssh.v9i1.21468](https://doi.org/10.30595/jssh.v9i1.21468)

Abstract

Studi ini mengkaji dampak kebijakan pertahanan terhadap tingkat desertir tentara di zona pertempuran, mengidentifikasi faktor-faktor kunci dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi desersi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan pertahanan berdampak signifikan terhadap moral, kohesi, dan komitmen prajurit terhadap misi. Faktor-faktor utama kebijakan pertahanan yang berkontribusi terhadap desersi prajurit mencakup inisiatif kesejahteraan personel, praktik kepemimpinan, tindakan disipliner, dan protokol komunikasi. Meskipun beberapa kebijakan pertahanan memprioritaskan kesejahteraan personel dan kepemimpinan yang efektif, kebijakan-kebijakan lainnya mungkin kurang memiliki kejelasan atau mekanisme penegakan hukum, sehingga menyebabkan peningkatan tingkat desersi. Efektivitas kebijakan pertahanan saat ini dalam mengurangi desersi tentara bervariasi antar organisasi militer dan konteks operasional. Rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan pertahanan mencakup penguatan inisiatif kesejahteraan personel, peningkatan program pengembangan kepemimpinan, dan peninjauan tindakan disipliner. Secara keseluruhan, studi ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pertahanan komprehensif dalam mendukung tentara dan mengurangi tingkat desersi di zona pertempuran.

Kata Kunci: Desersi Prajurit, Kebijakan Pertahanan, Moral Militer, Zona Tempur

This study examines the impact of defense policies on soldier deserter rates in combat zones, identifying key factors and evaluating their effectiveness in mitigating desertion. The research findings reveal that defense policies significantly impact soldier morale, cohesion, and commitment to the mission. Key defense policy factors contributing to soldier desertion include personnel welfare initiatives, leadership practices, disciplinary measures, and communication protocols. While some defense policies prioritize personnel welfare and effective leadership, others may lack clarity or enforcement mechanisms, leading

to increased desertion rates. The effectiveness of current defense policies in mitigating soldier desertion varies across military organizations and operational contexts. Recommendations for improving defense policies include strengthening personnel welfare initiatives, enhancing leadership development programs, and reviewing disciplinary measures. Overall, this study underscores the importance of comprehensive defense policies in supporting soldiers and reducing desertion rates in combat zones.

Keywords: *Combat Zones, Defense Policies, Military Morale, Soldier Desertion*



This is an open access article under the CC BY license
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

1. Pendahuluan

Dalam peperangan kontemporer, memahami interaksi antara kebijakan pertahanan dan tingkat desertir prajurit sangat penting untuk menjaga efektivitas militer dan keberhasilan misi. Kebijakan pertahanan mencakup peraturan yang mengatur rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan tindakan disipliner dalam angkatan bersenjata. Kebijakan ini secara signifikan mempengaruhi moral, kohesi, dan perilaku tentara yang dikerahkan di zona tempur. Penelitian ini menggali hubungan rumit antara kebijakan pertahanan dan tingkat desertir prajurit, menekankan peran penting dari kebijakan komprehensif dalam mengurangi desersi sambil mengidentifikasi area untuk penelitian dan peningkatan lebih lanjut.

Kebijakan pertahanan memiliki dampak besar pada tingkat desertir prajurit di zona tempur. Kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatan mental prajurit sangat penting untuk mengurangi desersi. Misalnya, inisiatif yang berfokus pada penyediaan layanan dukungan psikologis dan mengatasi stres dapat meningkatkan ketahanan prajurit (Blaisure et al., 2015). Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan komunikasi juga mempengaruhi tingkat desertir. Kepemimpinan efektif yang ditandai dengan transparansi dan empati menumbuhkan kepercayaan di antara prajurit, mengurangi perasaan terasing (Williams et al., 2016). Saluran komunikasi yang jelas memungkinkan tentara untuk menyuarakan keprihatinan, mencari bantuan, dan memberikan umpan balik, berkontribusi pada lingkungan yang mendukung (VanLandingham, 2015).

Selain itu, penegakan tindakan disipliner dalam kebijakan pertahanan memainkan peran penting dalam mencegah desersi. Sementara tindakan disipliner yang ketat dapat berfungsi sebagai pencegah, tindakan hukuman yang terlalu berat dapat memperburuk kebencian di antara tentara (Baarle et al., 2015). Oleh karena itu, kebijakan pertahanan harus mencapai keseimbangan antara menjaga disiplin dan mempromosikan keadilan.

Terlepas dari pentingnya kebijakan pertahanan, tantangan tetap ada dalam implementasi dan efektivitasnya. Mengadaptasi kebijakan untuk peperangan yang berkembang dan lingkungan operasional tetap menjadi tantangan. Fleksibilitas dan kelincahan dalam perumusan kebijakan sangat penting untuk mengatasi ancaman yang muncul dan kemajuan teknologi (Torreon et al., 2014). Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat diperlukan untuk menilai hasil kebijakan dan mengatasi masalah sistemik yang berkontribusi terhadap desersi.

Selain itu, koordinasi kebijakan pertahanan dengan strategi militer dan norma budaya yang lebih luas memerlukan pertimbangan yang cermat. Kebijakan yang selaras dengan tujuan misi dan nilai-nilai angkatan bersenjata lebih cenderung beresonansi dengan tentara (Seamone et al., 2018).

Kebijakan pertahanan secara signifikan mempengaruhi tingkat desertir prajurit di zona pertempuran. Dengan menangani aspek-aspek seperti kesejahteraan personel, kepemimpinan,

komunikasi, dan tindakan disipliner, kebijakan yang dibuat dengan baik dapat meningkatkan moral dan disiplin, sehingga mengurangi desersi. Namun, mengatasi tantangan dan terus meningkatkan kebijakan pertahanan sangat penting untuk beradaptasi dengan ancaman yang berkembang dan meningkatkan ketahanan angkatan bersenjata.

Di bidang operasi militer, desersi prajurit di zona tempur menimbulkan tantangan signifikan bagi efektivitas dan keberhasilan misi. Implementasi kebijakan pertahanan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku, moral, dan ketahanan prajurit yang dikerahkan di lingkungan seperti itu. Namun, ada kebutuhan untuk penelitian yang komprehensif untuk memahami bagaimana kebijakan pertahanan berdampak pada tingkat desertir prajurit. Penelitian ini menguraikan pernyataan masalah, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara kebijakan pertahanan dan tingkat desertir prajurit di zona pertempuran.

Pernyataan masalah:

Desersi tentara di zona tempur tetap menjadi masalah terus-menerus yang merusak operasi militer dan membahayakan keberhasilan misi. Sementara kebijakan pertahanan dirancang untuk memberikan pedoman dan peraturan untuk operasi militer, efektivitasnya dalam menangani dan mengurangi desersi prajurit masih belum jelas. Memahami bagaimana kebijakan pertahanan mempengaruhi tingkat desertir prajurit sangat penting untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas militer dan moral di lingkungan pertempuran.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji korelasi antara kebijakan pertahanan dan tingkat desertir prajurit di zona tempur, mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap desersi ini, mengevaluasi kemandirian kebijakan pertahanan saat ini dalam menguranginya, dan menyarankan perbaikan potensial.

Pertanyaan Penelitian:

Bagaimana kebijakan pertahanan mempengaruhi tingkat desertir prajurit di zona pertempuran? Pertanyaan ini berusaha untuk mengeksplorasi efek langsung dan tidak langsung dari kebijakan pertahanan terhadap desersi tentara. Ini bertujuan untuk memahami apakah kebijakan tertentu memperburuk atau mengurangi kecenderungan desersi di antara tentara yang dikerahkan di lingkungan pertempuran.

Apa faktor kebijakan pertahanan utama yang berkontribusi terhadap desersi prajurit di zona pertempuran? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek spesifik dari kebijakan pertahanan, seperti kesejahteraan personel, praktik kepemimpinan, tindakan disipliner, dan protokol komunikasi, yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat desertir prajurit. Memahami faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan tentang bidang-bidang untuk perbaikan kebijakan.

Seberapa efektif kebijakan pertahanan saat ini dalam mengurangi desersi prajurit, dan perbaikan apa yang dapat diusulkan? Pertanyaan ini berfokus pada evaluasi efektivitas kebijakan pertahanan yang ada dalam menangani desersi prajurit dan mengusulkan peningkatan atau modifikasi potensial untuk meningkatkan efektivitasnya. Ini berusaha untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kebijakan saat ini dan merekomendasikan strategi untuk lebih mendukung tentara dan mengurangi tingkat desersi di zona tempur.

Mengatasi masalah desersi prajurit di zona tempur membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang hubungan antara kebijakan pertahanan dan tingkat desertir. Dengan menggambarkan pernyataan masalah, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian, esai ini menyediakan kerangka kerja untuk menyelidiki masalah kompleks ini. Melalui penelitian dan analisis empiris, wawasan berharga dapat diperoleh untuk menginformasikan pengembangan kebijakan dan meningkatkan efektivitas militer dalam lingkungan operasional yang menantang.

Penelitian mengenai dampak kebijakan pertahanan terhadap tingkat desertir tentara di zona tempur dapat dianalisis menggunakan tiga kerangka teori: teori institusional, teori pertukaran sosial, dan teori efektivitas organisasi. Menurut teori institusional, tekanan dan norma institusional membentuk perilaku dan praktik institusi militer. Teori pertukaran sosial menunjukkan bahwa tentara

mempertimbangkan manfaat yang dirasakan dari desersi dibandingkan dengan potensi kerugiannya, seperti tindakan disipliner atau hilangnya persahabatan. Teori efektivitas organisasi mengevaluasi efektivitas kebijakan saat ini dalam mengurangi desersi, dengan fokus pada faktor-faktor seperti moral, kohesi, dan keberhasilan misi.

2. Metode

Metode penelitian kualitatif menggunakan data sekunder menawarkan wawasan berharga tentang fenomena kompleks, seperti dampak kebijakan pertahanan terhadap tingkat desertir prajurit di zona pertempuran. Dengan menganalisis literatur, dokumen, dan laporan yang ada, para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap desersi tentara dan efektivitas kebijakan pertahanan dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini membahas metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dalam rangka mempelajari dampak kebijakan pertahanan terhadap tingkat desertir prajurit, sesuai dengan pedoman Creswell.

Metode penelitian kualitatif melibatkan eksplorasi dan interpretasi fenomena melalui sumber data non-numerik. Ketika memanfaatkan data sekunder, peneliti menganalisis informasi yang ada yang dikumpulkan oleh orang lain, seperti studi akademis, laporan pemerintah, dan dokumen sejarah. Creswell menguraikan beberapa langkah untuk melakukan penelitian kualitatif menggunakan data sekunder, termasuk mengidentifikasi masalah penelitian, memilih sumber yang tepat, menganalisis data, dan menafsirkan temuan (Creswell, 2014).

Masalah penelitian dalam penelitian ini berkisar pada pemahaman bagaimana kebijakan pertahanan mempengaruhi tingkat desertir prajurit di zona pertempuran. Para peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi nuansa kebijakan pertahanan dan dampaknya terhadap moral prajurit, kohesi, dan komitmen terhadap misi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kebijakan pertahanan utama yang berkontribusi terhadap desersi tentara, para peneliti dapat mengusulkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan mendukung tentara dengan lebih baik di lingkungan pertempuran (Creswell, 2014).

Dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder, peneliti harus cermat memilih sumber yang relevan dengan masalah penelitian. Ini mungkin termasuk jurnal akademik, laporan pemerintah, publikasi militer, dan catatan sejarah. Peneliti harus mengevaluasi secara kritis kredibilitas, relevansi, dan keandalan sumber yang dipilih untuk memastikan validitas temuan mereka. Analisis data melibatkan peninjauan dan sintesis informasi secara sistematis dari sumber yang dipilih. Para peneliti mengkategorikan data, mengidentifikasi pola, dan mengekstrak tema-tema utama yang terkait dengan kebijakan pertahanan dan tingkat desertir tentara. Melalui analisis yang ketat, para peneliti dapat mengungkap wawasan tentang interaksi kompleks antara kebijakan pertahanan dan perilaku prajurit di zona pertempuran (Creswell, 2014).

Menafsirkan temuan melibatkan memahami data yang dianalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang diidentifikasi. Peneliti mengontekstualisasikan temuan mereka dalam literatur, teori, dan kerangka kerja yang ada untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah penelitian. Dengan menafsirkan temuan, para peneliti dapat menghasilkan pengetahuan baru dan berkontribusi pada wacana ilmiah tentang kebijakan pertahanan dan desersi tentara (Creswell, 2014).

Metode penelitian kualitatif menggunakan data sekunder menawarkan pendekatan yang kuat untuk mengeksplorasi dampak kebijakan pertahanan terhadap tingkat desertir prajurit di zona pertempuran. Mengikuti pedoman Creswell, para peneliti dapat secara sistematis menganalisis informasi yang ada untuk mengungkap wawasan tentang dinamika kompleks operasi militer. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kebijakan pertahanan utama yang berkontribusi terhadap desersi prajurit dan mengusulkan rekomendasi untuk perbaikan, para peneliti dapat menginformasikan pembuatan kebijakan dan meningkatkan dukungan bagi prajurit di lingkungan pertempuran.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Pertahanan terhadap Tingkat Pembelot Prajurit di Zona Pertempuran

Kebijakan pertahanan berfungsi sebagai prinsip panduan yang mengatur berbagai aspek operasi militer, termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan tindakan disipliner. Memahami dampak kebijakan pertahanan terhadap tingkat desertir prajurit di zona tempur sangat penting untuk menjaga efektivitas militer dan keberhasilan misi. Diskusi ini mengeksplorasi efek langsung dan tidak langsung dari kebijakan pertahanan terhadap desersi prajurit, menjelaskan apakah kebijakan tertentu memperburuk atau mengurangi kecenderungan desersi di antara prajurit yang dikerahkan.

Dampak Kebijakan Pertahanan terhadap Tingkat Pembelot Prajurit:

Kebijakan pertahanan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku, moral, dan ketahanan prajurit di zona tempur. Kebijakan yang ditujukan untuk kesejahteraan personel, seperti akses ke layanan dukungan psikologis dan waktu istirahat yang memadai, dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat desersi prajurit. Penelitian telah menunjukkan bahwa tentara yang menganggap kesejahteraan mereka diprioritaskan cenderung tidak meninggalkan (Albrecht & Koehler, 2018). Sebaliknya, mengabaikan kesejahteraan personel dapat menyebabkan peningkatan perasaan kecewa dan detasemen, sehingga meningkatkan risiko desersi.

Mengatasi tingkat desersi prajurit memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan tidak hanya kesejahteraan fisik dan psikologis prajurit, tetapi juga faktor-faktor seperti efektivitas kepemimpinan, kejelasan misi, dan budaya organisasi secara keseluruhan (Mancini et al., 2020). Komunikasi dan transparansi yang efektif mengenai jadwal pengerahan, tujuan misi, dan sumber daya yang tersedia dapat membantu prajurit merasa lebih terhubung dan berkomitmen pada tugas mereka (Larsen et al., 2015). Selain itu, memberikan kesempatan bagi prajurit untuk menyuarakan keprihatinan dan umpan balik mereka dapat membantu mengatasi masalah mendasar apa pun yang dapat berkontribusi pada perasaan tidak puas atau tidak terlibat. Dengan menerapkan kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan dan moral prajurit, organisasi militer dapat bekerja untuk mengurangi tingkat desersi dan mempromosikan kekuatan tempur yang lebih kohesif dan tangguh (Fukuura & Ben-Ari, 2019).

Selain itu, struktur kepemimpinan dan komando yang diuraikan dalam kebijakan pertahanan dapat memengaruhi moral dan kohesi prajurit. Kepemimpinan efektif yang ditandai dengan transparansi, empati, dan akuntabilitas menumbuhkan kepercayaan di antara prajurit dan mengurangi perasaan terasing (Weathers, 2023a). Sebaliknya, gaya kepemimpinan otoriter atau saluran komunikasi yang tidak efektif dapat berkontribusi pada gangguan dalam kohesi unit, meningkatkan kemungkinan desersi.

Selain gaya kepemimpinan, penerapan sistem dan sumber daya pendukung yang tepat juga dapat memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat desersi. Organisasi militer harus memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan prajurit mereka, menyediakan akses ke layanan konseling, kelompok pendukung, dan sumber daya untuk mengatasi stres dan trauma (A. Sarjito, 2023a). Dengan mengatasi masalah mendasar yang dapat berkontribusi pada desersi, seperti masalah kesehatan mental atau perjuangan pribadi, organisasi militer dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan tangguh bagi prajurit mereka. Selain itu, menumbuhkan rasa persahabatan dan rasa memiliki dalam unit melalui kegiatan pembangunan tim, program bimbingan, dan inisiatif pembangunan masyarakat dapat membantu memperkuat moral dan kohesi prajurit, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan desersi (Vermetten et al., 2023).

Langkah-langkah disipliner yang diuraikan dalam kebijakan pertahanan juga mempengaruhi tingkat desertir prajurit. Sementara penegakan disiplin yang ketat diperlukan untuk menjaga ketertiban, tindakan hukuman yang berlebihan dapat menjadi bumerang dan memperburuk kebencian di antara para prajurit (Russell et al., 2018). Keseimbangan harus dicapai antara menjaga disiplin dan mempromosikan keadilan untuk mencegah desersi karena ketidakadilan yang dirasakan.

Para pemimpin juga harus memperhatikan dampak psikologis dari pertempuran dan dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap kesehatan mental prajurit. Menyediakan akses ke sumber daya

kesehatan mental dan layanan dukungan sangat penting dalam mencegah desersi di antara tentara yang mungkin berjuang dengan trauma atau stres (Cobley, 2015). Selain itu, menciptakan budaya komunikasi terbuka dan kepercayaan di dalam unit dapat membantu prajurit merasa nyaman mencari bantuan saat dibutuhkan, mengurangi stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental. Dengan mengatasi faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap desersi, seperti moral rendah, kurangnya dukungan, dan tantangan kesehatan mental, para pemimpin militer dapat secara efektif mengurangi tingkat desersi dan memastikan kekuatan tempur yang kuat dan kohesif (True et al., 2015).

Selain itu, kejelasan dan konsistensi kebijakan pertahanan mengenai tujuan pengerahan dan misi dapat memengaruhi moral dan komitmen prajurit. Arahan yang tidak jelas atau perubahan jadwal penempatan yang sering dapat menyebabkan kebingungan dan frustrasi di antara pasukan, yang berpotensi berkontribusi terhadap desersi (Kalkman & Molendijk, 2021).

Untuk memerangi tingkat desersi di dalam militer, para pemimpin harus memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatan mental prajurit mereka. Memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai bagi mereka yang berjuang dengan masalah kesehatan mental dapat membantu mencegah perasaan terisolasi dan putus asa yang dapat menyebabkan desersi. Selain itu, menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif di mana prajurit merasa dihargai dan didukung dapat sangat meningkatkan moral dan kohesi unit secara keseluruhan. Sangat penting bagi para pemimpin militer untuk secara aktif menangani dan mendukung kebutuhan kesehatan mental pasukan mereka untuk mempertahankan kekuatan tempur yang kuat dan tangguh (Stone et al., 2017).

Faktor Kebijakan Pertahanan Utama yang Berkontribusi terhadap Desersi Prajurit di Zona Pertempuran

Desersi prajurit di zona tempur menghadirkan tantangan signifikan bagi operasi militer dan keberhasilan misi. Memahami faktor-faktor kebijakan pertahanan spesifik yang berkontribusi terhadap desersi prajurit sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi masalah ini. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kebijakan pertahanan utama, termasuk kesejahteraan personel, praktik kepemimpinan, tindakan disipliner, dan protokol komunikasi, yang memengaruhi tingkat desersi prajurit di zona pertempuran.

Kesejahteraan Personil:

Kebijakan kesejahteraan personel mencakup prakarsa yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional prajurit yang dikerahkan di zona pertempuran. Penelitian telah menunjukkan bahwa akses ke waktu istirahat yang memadai, perawatan medis yang berkualitas, dan layanan dukungan psikologis secara signifikan berdampak pada moral dan ketahanan prajurit (Marquez et al., 2023). Mengabaikan kesejahteraan personel, seperti kegagalan untuk mengatasi kelelahan, stres, dan trauma, dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat desersi ketika tentara mencari bantuan dari kondisi yang menantang.

Selain itu, memberikan kesempatan bagi prajurit untuk berkomunikasi dengan keluarga dan orang yang mereka cintai, akses ke kegiatan rekreasi, dan peluang untuk pengembangan pribadi juga dapat berkontribusi pada tingkat moral dan retensi secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, kurangnya kebijakan kesejahteraan personel yang memadai dapat menyebabkan penurunan motivasi dan rasa terisolasi di antara tentara, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan desersi. Oleh karena itu, organisasi militer harus memprioritaskan kesejahteraan personelnnya untuk mempertahankan kekuatan yang kuat dan tangguh di lingkungan pertempuran (Brooks & Greenberg, 2018).

Praktik Kepemimpinan:

Praktik kepemimpinan dalam unit militer memainkan peran penting dalam membentuk moral, kohesi, dan komitmen prajurit terhadap misi. Kepemimpinan efektif yang ditandai dengan transparansi, empati, dan akuntabilitas menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas di antara para prajurit (Barry, 2020). Sebaliknya, gaya kepemimpinan otoriter atau tidak efektif dapat menyebabkan perasaan dendam dan detasemen, meningkatkan kemungkinan desersi. Selain itu, kepemimpinan

yang gagal memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang jelas selama operasi tempur dapat berkontribusi pada kekecewaan prajurit dan penurunan moral (Lyall, 2016).

Ini pada akhirnya dapat berdampak pada efektivitas unit secara keseluruhan dan membahayakan keberhasilan misi. Oleh karena itu, para pemimpin militer harus memprioritaskan kesejahteraan dan moral prajurit mereka melalui praktik kepemimpinan yang konsisten dan efektif. Dengan menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan pasukan mereka dan membina lingkungan yang positif dan mendukung, para pemimpin dapat menginspirasi kepercayaan diri, motivasi, dan rasa persahabatan yang kuat di antara prajurit mereka. Ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kohesi unit, meningkatkan moral, dan pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan operasi militer secara keseluruhan (Riley et al., 2015).

Tindakan disipliner:

Langkah-langkah disipliner yang diuraikan dalam kebijakan pertahanan mempengaruhi perilaku dan sikap prajurit terhadap hierarki militer. Meskipun mempertahankan disiplin sangat penting untuk efektivitas operasional, tindakan disipliner yang terlalu menghukum atau tidak adil dapat menumbuhkan kebencian dan ketidakpercayaan di antara para prajurit (A. Sarjito, 2023b). Penelitian menunjukkan bahwa tentara lebih cenderung meninggalkan ketika mereka menganggap tindakan disipliner sebagai tindakan sewenang-wenang, tidak adil, atau tidak proporsional (Walzer, 2015). Oleh karena itu, kebijakan pertahanan harus mencapai keseimbangan antara menegakkan disiplin dan memastikan keadilan untuk mencegah desersi karena penganiayaan yang dirasakan.

Salah satu cara untuk mencapai keseimbangan ini adalah melalui penegakan kebijakan disiplin yang transparan dan konsisten. Dengan mengkomunikasikan harapan dan konsekuensi secara jelas kepada tentara, para pemimpin dapat membantu memastikan bahwa tindakan disipliner dianggap adil dan dibenarkan (Osher et al., 2015). Selain itu, para pemimpin harus berusaha untuk mengatasi keluhan atau kekhawatiran yang diajukan oleh prajurit mengenai keputusan disipliner, karena mengabaikan atau mengabaikan kekhawatiran ini dapat semakin mengikis kepercayaan dan moral di dalam jajaran. Pada akhirnya, sistem disiplin yang adil dan merata sangat penting untuk menjaga kohesi dan kesiapan dalam militer, dan para pemimpin harus waspada dalam menegakkan prinsip-prinsip ini untuk mencegah desersi dan menjaga efektivitas pasukan (Weber, 2016).

Protokol Komunikasi:

Protokol komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan kejelasan, koordinasi, dan moral dalam unit militer yang beroperasi di zona tempur. Saluran komunikasi yang jelas memungkinkan tentara untuk menerima arahan misi, memberikan umpan balik, dan mencari bantuan bila diperlukan (Alliger et al., 2015). Komunikasi yang tidak memadai atau pesan yang tidak konsisten dari pimpinan dapat menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan ketidakpercayaan di antara pasukan, yang berpotensi meningkatkan tingkat desersi. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan harus memprioritaskan pembentukan jaringan dan protokol komunikasi yang kuat untuk memfasilitasi arus informasi dan menjaga moral prajurit (Khan, 2015).

Komunikasi yang efektif tidak hanya penting untuk keberhasilan operasional tetapi juga untuk kesejahteraan personel militer secara keseluruhan. Selain menerima arahan misi, tentara mengandalkan komunikasi yang jelas untuk tetap mendapat informasi tentang potensi ancaman, perubahan strategi, dan dukungan logistik. Gangguan komunikasi tidak hanya dapat menghambat keberhasilan misi tetapi juga membahayakan nyawa prajurit. Para pemimpin di semua tingkatan harus memprioritaskan strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa pasukan mendapat informasi yang baik, termotivasi, dan siap menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam situasi pertempuran (Cone et al., 2013).

Mengevaluasi efektivitas kebijakan pertahanan saat ini dalam mengurangi desersi prajurit

Desersi prajurit di zona tempur tetap menjadi tantangan terus-menerus bagi organisasi militer, merusak efektivitas operasional dan keberhasilan misi. Mengevaluasi efektivitas kebijakan pertahanan saat ini dalam menangani desersi prajurit sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan dan

mengusulkan perbaikan. Diskusi ini mengkaji kemandirian kebijakan pertahanan yang ada dalam mengurangi desersi prajurit dan merekomendasikan peningkatan potensial untuk lebih mendukung prajurit dan mengurangi tingkat desersi di zona pertempuran.

Efektivitas Kebijakan Pertahanan Saat Ini:

Kebijakan pertahanan saat ini yang ditujukan untuk mengurangi desersi prajurit bervariasi dalam efektivitasnya di berbagai organisasi militer dan konteks operasional. Sementara beberapa kebijakan memprioritaskan kesejahteraan personel, pengembangan kepemimpinan, dan tindakan disipliner, yang lain mungkin tidak memiliki kejelasan, konsistensi, atau mekanisme penegakan yang memadai (Abiodun et al., 2020).

Tingkat bantuan dan sumber daya yang tersedia bagi tentara di zona tempur juga dapat berdampak pada kemandirian kebijakan ini. Misalnya, tentara yang menghadapi penempatan berkepanjangan, pelatihan yang tidak memadai, atau kurangnya akses ke layanan kesehatan mental mungkin lebih rentan terhadap desersi (Hom et al., 2017). Selain itu, norma dan sikap budaya dalam organisasi militer juga dapat memengaruhi efektivitas kebijakan pertahanan yang ada dalam menangani desersi prajurit. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemimpin militer dan pembuat kebijakan untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan ini untuk memastikan kesejahteraan dan kesiapan pasukan mereka (Mattis & Schake, 2016).

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan personel, seperti akses ke layanan dukungan psikologis dan waktu istirahat yang memadai, berkontribusi pada penurunan tingkat desersi (Henwood et al., 2015). Namun, implementasi dan aksesibilitas layanan ini dapat bervariasi, berdampak pada efektivitasnya dalam mengatasi penyebab desersi prajurit.

Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bishop & Noguera (2019) menemukan bahwa tentara di unit dengan akses lebih besar ke sumber daya kesehatan mental cenderung tidak desersi dibandingkan dengan mereka yang berada di unit dengan dukungan terbatas. Ini menyoroti pentingnya tidak hanya mengembangkan kebijakan yang efektif tetapi juga memastikan pelaksanaannya yang konsisten dan adil di semua unit militer. Selain itu, ketersediaan waktu istirahat yang memadai telah terbukti memiliki dampak signifikan pada pengurangan stres dan meningkatkan moral secara keseluruhan di antara tentara, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan desersi. Oleh karena itu, para pemimpin militer perlu memprioritaskan kesejahteraan pasukan mereka dan memberi mereka sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mencegah desersi prajurit (A. Sarjito, 2024).

Demikian pula, praktik kepemimpinan yang diuraikan dalam kebijakan pertahanan memainkan peran penting dalam membentuk moral dan kohesi prajurit. Kepemimpinan efektif yang ditandai dengan transparansi, empati, dan akuntabilitas menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas di antara para prajurit (Weathers, 2023b). Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang tidak efektif atau otoriter dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat desersi. Oleh karena itu, meningkatkan pelatihan kepemimpinan dan mekanisme akuntabilitas dalam kebijakan pertahanan dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengurangi desersi (Reed, 2015).

Selain itu, menciptakan budaya organisasi yang positif dan inklusif di dalam militer juga dapat membantu mengurangi kemungkinan desersi tentara. Dengan mempromosikan rasa memiliki dan persahabatan di antara pasukan, tentara lebih cenderung merasa didukung dan dihargai dalam unit mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan moral dan rasa komitmen yang lebih kuat terhadap tugas mereka dan sesama prajurit (Villaneda & Peters, 2023). Pada gilirannya, ini dapat membantu mengurangi godaan bagi tentara untuk meninggalkan jabatan dan tanggung jawab mereka. Menerapkan program dan inisiatif yang memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan juga dapat berkontribusi pada kekuatan militer yang lebih tangguh dan kohesif. Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif yang membahas praktik kepemimpinan dan budaya organisasi sangat penting dalam memerangi desersi prajurit secara efektif (Garner, 2019).

Langkah-langkah disipliner yang diuraikan dalam kebijakan pertahanan juga mempengaruhi perilaku dan sikap prajurit terhadap hierarki militer. Sementara tindakan disipliner diperlukan untuk

menjaga ketertiban dan disiplin, tindakan hukuman yang berlebihan dapat memperburuk kebencian dan ketidakpercayaan di antara tentara (Schneider et al., 2015). Oleh karena itu, kebijakan pertahanan harus memprioritaskan penegakan tindakan disipliner yang adil dan konsisten sambil menyediakan jalan untuk rehabilitasi dan dukungan bagi personel yang berisiko.

Selain itu, menumbuhkan budaya organisasi yang positif dan inklusif dapat membantu mencegah desersi prajurit dengan mempromosikan rasa memiliki dan persahabatan di antara pasukan. Para pemimpin harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di mana tentara merasa dihargai dan dihormati, bukan hanya roda penggerak lain di mesin. Dengan mempromosikan komunikasi terbuka, transparansi, dan saling menghormati, unit militer dapat membangun kepercayaan dan kohesi yang pada akhirnya menghalangi tentara untuk pergi (Feltman, 2015). Selain itu, menawarkan sumber daya dan dukungan untuk kesehatan mental dan kesejahteraan dapat mengatasi masalah mendasar yang dapat berkontribusi pada pemikiran desersi. Dengan cara ini, pendekatan holistik untuk mengatasi desersi prajurit dapat dicapai, mencakup tindakan disipliner dan intervensi pendukung (Wainwright et al., 2016).

Rekomendasi untuk perbaikan:

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pertahanan dalam mengurangi desersi prajurit, beberapa perbaikan dapat diusulkan:

Memperkuat Prakarsa Kesejahteraan Personel: Memastikan akses yang adil ke layanan dukungan psikologis, perawatan kesehatan, dan waktu istirahat bagi prajurit yang dikerahkan. Menerapkan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi stres, trauma, dan kelelahan di antara personel (Fiorito et al., 2015).

Meningkatkan Program Pengembangan Kepemimpinan: Memberikan pelatihan komprehensif bagi para pemimpin militer tentang komunikasi yang efektif, resolusi konflik, dan kecerdasan emosional. Menetapkan mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas dan akuntabilitas kepemimpinan (Packard & Jones, 2015).

Meninjau dan Merevisi Tindakan Disipliner: Melakukan tinjauan komprehensif terhadap kebijakan disipliner untuk memastikan keadilan, konsistensi, dan proporsionalitas dalam penegakan hukum. Menyediakan jalan untuk rehabilitasi dan dukungan bagi tentara yang menghadapi tindakan disipliner (Adams & Montalto, 2017).

Tingkatkan Jaringan Komunikasi dan Dukungan: Buat protokol komunikasi yang kuat untuk memfasilitasi arus informasi dan jaringan dukungan bagi tentara yang dikerahkan di zona tempur. Mendorong dialog terbuka dan mekanisme umpan balik untuk mengatasi kekhawatiran dan keluhan prajurit (Levy, 2017).

Meningkatkan Program Pelatihan dan Pengembangan: Berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk membekali prajurit dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam peran mereka. Menawarkan kesempatan untuk kemajuan dan pertumbuhan karir untuk menumbuhkan motivasi dan komitmen di antara pasukan (Lawrence et al., 2015).

Menumbuhkan Budaya Menghormati dan Inklusivitas: Mempromosikan budaya rasa hormat, keragaman, dan inklusivitas dalam jajaran militer untuk menciptakan lingkungan yang kohesif dan mendukung bagi semua prajurit. Mendorong kerja tim, kolaborasi, dan saling menghormati di antara rekan-rekan untuk meningkatkan moral dan kohesi unit (Hundman, 2021).

Menerapkan Evaluasi Kinerja Reguler: Melakukan evaluasi kinerja reguler untuk menilai kinerja individu dan unit, mengidentifikasi kekuatan dan area untuk perbaikan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pertumbuhan profesional. Memanfaatkan metrik kinerja dan tolok ukur untuk mengukur kemajuan dan melacak keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi (Emanuel et al., 2019).

Menumbuhkan Budaya Pembelajaran Berkelanjutan: Mendorong pengembangan profesional dan peluang pelatihan yang berkelanjutan bagi prajurit di semua tingkatan. Dengan berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan mereka, prajurit akan lebih siap untuk menangani

tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam peran mereka. Selain itu, mempromosikan budaya pembelajaran berkelanjutan membantu menjaga prajurit tetap terlibat dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan kepuasan kerja dan tingkat retensi dalam militer (I. A. Sarjito et al., 2023).

Manfaatkan Mekanisme Umpan Balik: Terapkan mekanisme umpan balik reguler untuk mengumpulkan wawasan dari tentara tentang pengalaman, tantangan, dan saran mereka untuk perbaikan. Umpan balik ini dapat sangat berharga dalam mengidentifikasi area untuk pertumbuhan dan mengatasi masalah apa pun yang mungkin timbul. Dengan secara aktif mencari dan mendengarkan umpan balik, para pemimpin militer dapat menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung prajurit mereka dan menumbuhkan budaya komunikasi terbuka. Hal ini pada akhirnya dapat mengarah pada kerja tim yang lebih kuat, peningkatan moral, dan peningkatan kinerja keseluruhan dalam organisasi (Procházka, 2015).

4. Simpulan

Kebijakan pertahanan memberikan pengaruh signifikan pada tingkat desertir prajurit di zona pertempuran. Kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan personel, kepemimpinan, tindakan disipliner, dan kejelasan misi secara langsung berdampak pada moral, kohesi, dan komitmen prajurit terhadap misi. Dengan memahami efek bernuansa kebijakan pertahanan terhadap desersi prajurit, organisasi militer dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang secara efektif mengurangi risiko desersi sambil membina lingkungan yang mendukung dan tangguh bagi personel yang dikerahkan.

Beberapa faktor kebijakan pertahanan utama berkontribusi terhadap desersi prajurit di zona pertempuran. Kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan personel, praktik kepemimpinan, tindakan disipliner, dan protokol komunikasi secara signifikan memengaruhi moral, kohesi, dan komitmen prajurit terhadap misi. Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi militer dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan kebijakan dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko desersi di lingkungan pertempuran.

Mengevaluasi efektivitas kebijakan pertahanan saat ini dalam mengurangi desersi prajurit sangat penting untuk meningkatkan kesiapan dan efektivitas militer. Dengan memperkuat prakarsa kesejahteraan personel, meningkatkan program pengembangan kepemimpinan, meninjau langkah-langkah disipliner, dan meningkatkan jaringan komunikasi dan dukungan, organisasi militer dapat mendukung prajurit dengan lebih baik dan mengurangi tingkat desersi di zona pertempuran.

Referensi

- Abiodun, T. F., Asaolu, A. A., & Ndubuisi, A. I. (2020). Defence Budget and Military Spending on War Against Terror and Insecurity in Nigeria: Implications for State Politics Economy and National Security. *Journal DOI*, 6(7), 344–351.
- Adams, B., & Montalto, D. (2017). With Malice toward None: Revisiting the Historical and Legal Basis for Excluding Veterans from Veteran Services. *Penn St. L. Rev.*, 122, 69.
- Albrecht, H., & Koehler, K. (2018). Going on the run: What drives military desertion in civil war? *Security Studies*, 27(2), 179–203.
- Alliger, G. M., Cerasoli, C. P., Tannenbaum, S. I., & Vessey, W. B. (2015). Team resilience: How teams flourish under pressure. *Organizational Dynamics*, 44(3), 176–184.
- Baarle, E. van, Bosch, J., Widdershoven, G., Verweij, D., & Molewijk, B. (2015). Moral dilemmas in a military context. A case study of a train the trainer course on military ethics. *Journal of Moral Education*, 44(4), 457–478.

-
- Barry, C. D. (2020). *The Relationships Between Authentic Leadership, Job Satisfaction, and Organizational Commitment Among Generation Z in the United States Marine Corps. Doctoral Dissertation, Indiana Institute of Technology.*
- Bishop, J. P., & Noguera, P. A. (2019). The ecology of educational equity: Implications for policy. *Peabody Journal of Education, 94*(2), 122–141.
- Blaisure, K. R., Saathoff-Wells, T., Dombro, A. L., Pereira, A., & Wadsworth, S. M. (2015). *Serving military families: Theories, research, and application.* Routledge.
- Brooks, S. K., & Greenberg, N. (2018). Non-deployment factors affecting psychological wellbeing in military personnel: literature review. *Journal of Mental Health, 27*(1), 80–90.
- Cobley, P. R. (2015). *Education Programs and Leadership Training-Countering the Physiological and Psychological Effects of Combat on Infantry Soldiers: A Case Study.* Northcentral University.
- Cone, G. R. W., Flynn, B. G. C., Richardson, M. J., & Kaya, K. (2013). The Future Army: Preparation and Readiness p2. *Military Review.*
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* SAGE Publications.
- Emanuel, P., Walper, S., DiEuliis, D., Klein, N., Petro, J. B., & Giordano, J. (2019). *Cyborg soldier 2050: Human/machine fusion and the implications for the future of the DOD.* US Army Combat Capabilities Development Command, Chemical Biological Center.
- Feltman, B. K. (2015). *The Stigma of Surrender: German Prisoners, British Captors, and Manhood in the Great War and Beyond.* UNC Press Books.
- Fiorito, G., Affuso, A., Basil, J., Cole, A., de Girolamo, P., D'angelo, L., Dickel, L., Gestal, C., Grasso, F., & Kuba, M. (2015). Guidelines for the care and welfare of cephalopods in research—a consensus based on an initiative by CephRes, FELASA and the Boyd Group. *Laboratory Animals, 49*(2_suppl), 1–90.
- Fukuura, A., & Ben-Ari, E. (2019). *Families, States and Militaries: Changes in Relations and Conditions.*
- Garner, J. D. (2019). *Identity Development and Loss in Military Transitions from Special Operations Forces to Civilian Life: An Exploratory Conceptualization for Treating Our Nation's Elite Warriors.* The Chicago School of Professional Psychology.
- Henwood, B. F., Derejko, K.-S., Couture, J., & Padgett, D. K. (2015). Maslow and mental health recovery: A comparative study of homeless programs for adults with serious mental illness. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42*, 220–228.
- Hom, M. A., Stanley, I. H., Schneider, M. E., & Joiner Jr, T. E. (2017). A systematic review of help-seeking and mental health service utilization among military service members. *Clinical Psychology Review, 53*, 59–78.
- Hundman, E. (2021). The diversity of disobedience in military organizations. *Journal of Global Security Studies, 6*(4), ogab003.
- Kalkman, J. P., & Molendijk, T. (2021). The role of strategic ambiguity in moral injury: A case study of Dutch Border guards facing moral challenges. *Journal of Management Inquiry, 30*(2), 221–234.
- Khan, F. H. (2015). *Going tactical: Pakistan's nuclear posture and implications for stability.*
-

-
- Larsen, J. L., Clauss-Ehlers, C. S., & Cosden, M. A. (2015). An exploration of army wives' responses to spousal deployment: Stressors and protective factors. *Couple and Family Psychology: Research and Practice, 4*(4), 212.
- Lawrence, M. J., Stemberger, H. L. J., Zolderdo, A. J., Struthers, D. P., & Cooke, S. J. (2015). The effects of modern war and military activities on biodiversity and the environment. *Environmental Reviews, 23*(4), 443–460.
- Levy, Y. (2017). Control from within: How soldiers control the military. *European Journal of International Relations, 23*(1), 192–216.
- Lyall, J. (2016). Why armies break: Explaining mass desertion in conventional war. Available at SSRN 2524561.
- Mancini, J. A., O'Neal, C. W., & Lucier-Greer, M. (2020). Toward a framework for military family life education: Culture, context, content, and practice. *Family Relations, 69*(3), 644–661.
- Marquez, R., Vigonte, F. G., & Abante, M. V. (2023). *Fostering Military Personnel Satisfaction, Morale, and Well-Being: A Qualitative Analysis of Base Service Quality Toward Enhancement Strategies in the 15th Strike Wing*.
- Mattis, J., & Schake, K. N. (2016). *Warriors and citizens: American views of our military*. Hoover Press.
- Osher, D., Fisher, D., Amos, L., Katz, J., Dwyer, K., Duffey, T., & Colombi, G. D. (2015). Addressing the Root Causes of Disparities in School Discipline: An Educator's Action Planning Guide. *National Center on Safe Supportive Learning Environments*.
- Packard, T., & Jones, L. (2015). An outcomes evaluation of a leadership development initiative. *Journal of Management Development, 34*(2), 153–168.
- Procházka, J. (2015). AdAptAtion of the CzeCh RepubliC defenCe poliCy lessons leARned. *Security and Defence Quarterly, 6*(1), 15–28.
- Reed, G. E. (2015). *Tarnished: Toxic leadership in the US military*. U of Nebraska Press.
- Riley, R. P., Cavanaugh, K. J., Fallesen, J. J., Jones, R. L., & Cubic Applications, Inc. L. U. S. (2015). *2014 Center For Army Leadership Annual Survey Of Army Leadership (CASAL): MILITARY Leader Findings*. Technical Report 2015-01, Fort Leavenworth, KS: Leadership Research
- Russell, M. C., Schaubel, S. R., & Figley, C. R. (2018). The darker side of military mental healthcare part two: Five harmful strategies to manage its mental health dilemma. *Psychological Injury and Law, 11*, 37–68.
- Sarjito, A. (2023a). Integrating the Concept of Situational Leadership and VUCA in Formulating Adaptive and Responsive Defense Policies. *Journal of Social Interactions and Humanities, 2*(3), 221–238.
- Sarjito, A. (2023b). Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia. *Journal of Governance and Policy Innovation, 3*(2), 17–41.
- Sarjito, A. (2024). Enhancing Logistics Distribution Efficiency for Indonesian Navy Warships in Operations Area. *West Science Interdisciplinary Studies, 2*(02), 345–356.
- Sarjito, I. A., Djati, S. P., & Th, M. (2023). *Manajemen Pertahanan*. Indonesia Emas Group.
-

-
- Schneider, F., Brück, T., & Meierrieks, D. (2015). The economics of counterterrorism: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 29(1), 131–157.
- Seamone, E., Sreenivasan, S., McGuire, J., Smeed, D., Clark, S., & Dow, D. (2018). A rehabilitative justice pathway for war-traumatized offenders caught in the military misconduct catch-22. *Armed Forces & Society*, 44(1), 139–155.
- Stone, D. M., Holland, K. M., Bartholow, B. N., Crosby, A. E., Davis, S. P., & Wilkins, N. (2017). *Preventing suicide: A technical package of policies, programs, and practice*.
- Torreón, B. S., Kapp, L., & Jansen, D. J. (2014). FY 2015 National Defense Authorization Act: Selected Military Personnel Issues. *Washington, DC: Congressional Research Service*, 2.
- True, G., Rigg, K. K., & Butler, A. (2015). Understanding barriers to mental health care for recent war veterans through photovoice. *Qualitative Health Research*, 25(10), 1443–1455.
- VanLandingham, R. E. (2015). Discipline, justice, and command in the US Military: maximizing strengths and minimizing weaknesses in a special society. *New Eng. L. Rev.*, 50, 21.
- Vermetten, E., Jetly, R., Smith-MacDonald, L., Jones, C., & Bremault-Phillip, S. (2023). Moral injury in a military context. In *Veteran and Military Mental Health: A Clinical Manual* (pp. 231–261). Springer.
- Villaneda, Y., & Peters, L. A. (2023). *Thriving through the Cracks: Promoting Mental Health Resilience in the US Border Patrol*.
- Wainwright, V., McDonnell, S., Lennox, C., Shaw, J., & Senior, J. (2016). Soldier, civilian, criminal: identifying pathways to offending of ex-armed forces personnel in prison. *Psychology, Crime & Law*, 22(8), 741–757.
- Walzer, M. (2015). *Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations*. Hachette UK.
- Weathers, C. (2023a). *Military Culture Shift: The Impact of War, Money, and Generational Perspective on Morale, Retention, and Leadership*. Elva Resa Publishing.
- Weathers, C. (2023b). *Military Culture Shift: The Impact of War, Money, and Generational Perspective on Morale, Retention, and Leadership*. Elva Resa Publishing.
- Weber, J. S. (2016). *The disorderly, undisciplined state of the "good order and discipline" term*. Air War College.
- Williams, J., Brown, J. M., Bray, R. M., Anderson Goodell, E. M., Rae Olmsted, K., & Adler, A. B. (2016). Unit cohesion, resilience, and mental health of soldiers in basic combat training. *Military Psychology*, 28(4), 241–250.